

## SUMMARY

### **Policy Analysis of Civil Servants's Career Development on Functional Health Position (Study at East Java Health Office)**

Policy analysis is one of the methods in research aimed at gaining a deeper understanding of technical social issues and directed towards gaining a better understanding. Policy analysis is always related to the thing before and after the policy is established and implemented. Policy analysis provides a clear definition of a problem's position, recommendations or prescriptions that may be useful, descriptive or monitoring, and evaluation of the policy.

Career development is a personal improvement undertaken by a person to achieve a career plan and upgraded by the personnel department to achieve a work plan according to the path or ladder of the organization. Main problem of this study is the low of civil servants's career development on functional position in health skill at East Java Health Office on 2017 that is only 2 people and there are still 123 position deficiency whereas available 127 people have potential to be placed.

This study aims to make policy recommendation about civil servants's career development on functional position of health field in East Java Health Office based on policy analysis that is policy implementation with category grouping based on ROCCIPI approach. The specific objectives of this study are 1) to identify policy on civil servants's career development on functional position of health field in East Java Provincial Health Office, 2) to review material content of legislation related to policy about civil servants's career development on functional position of health skill in Dinas Health of East Java Province 3) To analyze the implementation of policy on civil servants's career development on functional position of health field in East Java Provincial Health Office with category grouping based on ROCCIPI approach.

Design study of this policy research was descriptive approach with qualitative method. The research was located in East Java Health Office, Regional Officers Agency Office and Regional Office II State Personnel Officer. The research informants were from structural officials in East Java Health Office, Regional Personnel Board and Regional Office II of State Personnel Board.

Based on the result of policy identification, it was found that the civil servant's career development was regulated by the policy of the center in general and the regional policy which was regulated by the regional authority. The result from identification of the content of Legislation with the theory of career management namely Recruitment and Selection, Human Resources Allocation, Appraisal and Evaluation, Training and Development found that there was material content that should be contained in the regional policy, content material and content that was less meaningful obviously. From this research also obtained the result of policy implementation analysis based on category grouping using ROCCIPI approach consist of Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology.

Recommendations based on the results are still needed improving the content of legislation about the civil servants's career development, regulation socialization needs to be done, improvement of career development and placement and appointment of civil servants in functional positions so that the career development of civil servants as functional function of the health field can be done well.

## RINGKASAN

### **Analisis Kebijakan Tentang Pengembangan Karir PNS Dalam Jabatan Fungsional Keahlian Bidang Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur)**

Analisis kebijakan merupakan salah satu metode dalam penelitian yang ditujukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu sosial teknis dan diarahkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Analisis kebijakan selalu berkaitan dengan hal sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan dan diimplementasikan. Analisis kebijakan memberikan definisi yang jelas mengenai kedudukan suatu masalah, rekomendasi atau preskripsi yang mungkin dapat bermanfaat, deskripsi atau pemantauan, dan evaluasi mengenai kebijakan.

Pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai suatu rencana karir dan peningkatan oleh departemen personalia untuk mencapai suatu rencana kerja sesuai dengan jalur atau jenjang organisasi. Permasalahan yang diteliti adalah rendahnya pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang ditunjukkan dengan belum terisinya posisi untuk 7 jabatan fungsional yang membutuhkan 123 orang.

Tujuan penelitian menyusun rekomendasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil analisis kebijakan dengan pendekatan ROCCIPI. Tujuan khusus penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2) Melakukan *review* materi muatan Peraturan Perundang-undangan terkait kebijakan tentang pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 3) Menganalisis implementasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional keahlian bidang Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dengan pengelompokan kategori berdasarkan pendekatan ROCCIPI.

Jenis penelitian adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. Lokasi penelitian adalah di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Informan penelitian adalah dari pejabat struktural di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Badan Kepegawaian Daerah dan Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara.

Hasil penelitian : berdasarkan hasil identifikasi menunjukkan bahwa kebijakan tentang pengembangan karir PNS adalah UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pergub Jatim No.82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil *review* menunjukkan bahwa terdapat materi muatan yang perlu ditambahkan yaitu kewajiban menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, perencanaan pengembangan karir, pengisian jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, pengisian PNS dalam jabatan melalui mutasi dan

promosi, hak dan kesempatan pegawai ASN untuk mengembangkan kompetensi, mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, pengembangan kompetensi sebagai dasar pengembangan karir. Hasil *review* juga menunjukkan bahwa terdapat materi muatan dengan pembatasan terkait perpindahan antar jabatan bahwa dalam UU ASN diperbolehkan berpindah antar dan antara jabatan sedangkan dalam Pergub Jatim No.82 Tahun 2017 tidak diperbolehkan beralih jabatan menjadi jabatan pelaksana. Hasil analisis implementasi kebijakan didapatkan perbedaan persepsi dan perbedaan definisi tentang pengertian jabatan fungsional yang dapat menyebabkan perbedaan implementasi yang berakibat pada kurangnya perhatian untuk pengembangan karir dalam jabatan fungsional dari segi pembinaan, peningkatan kompetensi, dan lainnya.

Rekomendasi utama adalah menyempurnakan kebijakan daerah dengan menambahkan materi muatan yang merupakan kewenangan daerah, menambahkan “penjelasan” pasal untuk memperjelas definisi tentang perpindahan jabatan dan menyusun naskah akademik sebagai dasar penyempurnaan penyusunan kebijakan. Rekomendasi kedua adalah mengatasi permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan dengan menyusun SOP, sosialisasi regulasi yang tepat, menyusun pedoman untuk alur pengembangan karir, melakukan pemetaan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan melakukan monitoring serta evaluasi.

## ABSTRACT

### **Policy Analysis of Civil Servants's Career Development on Functional Health Position (Study at East Java Health Office)**

**Background:** Career development is a personal improvement that a person undertakes to achieve a planned career. Career development that should be accepted is not just a promotion to a higher position, but career success that is meant an employee progressing in working in the form of job satisfaction and skills improvement. The main problem of this research is the low level of civil servants's career development on functional position of health field in Health Department of East Java on 2017 that is only 2 people and there are still 123 position deficiency whereas available 127 people have potency to be placed.

**Objectives:** This study aims to develop policy recommendation about civil servant's career development on functional position of health field in East Java Health Office based on policy analysis that is policy implementation with category grouping based on ROCCIPI approach.

**Methods:** Design study of this policy research was descriptive approach with qualitative method which done by identification of policy, review the content of Legislation and analysis of policy implementation using ROCCIPI approach.

**Result:** The result of policy identification was found that civil servant's career development was regulated by policy of the center in general and the regional policy which was regulated by regional authority. The result of the review from content of the Law and Regulations with the theory of career management found that there was content that should be contained in regional policy, contradictory content and content material that was less clear. From this research also obtained the results of policy implementation analysis by category grouping based on ROCCIPI approach.

**Conclusion:** The main recommendation for conducting policy analysis is to review the content of legislation that should be in local policy and address existing issues in policy implementation.

**Keywords:** career development, policy analysis, functional health position, ROCCIPI

## ABSTRAK

### Analisis Kebijakan Tentang Pengembangan Karir PNS Dalam Jabatan Fungsional Keahlian Bidang Kesehatan (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur)

**Latar Belakang:** Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah rendahnya pengembangan karir PNS dalam jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2017 yang ditunjukkan dengan belum terisinya posisi untuk 7 jabatan fungsional yang membutuhkan 123 orang. Disisi lain terdapat PNS yang memenuhi syarat sebanyak 127 orang. **Tujuan penelitian:** menyusun rekomendasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS jabatan fungsional keahlian bidang kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil analisis kebijakan dengan pendekatan ROCCIPI. **Metode Penelitian:** Jenis penelitian adalah penelitian kebijakan dengan pendekatan deskriptif dan metode kualitatif. **Hasil penelitian:** Hasil identifikasi kebijakan tentang pengembangan karir PNS adalah UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Pergub Jatim No.82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hasil *review* materi muatan yang perlu ditambahkan adalah kewajiban menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS, perencanaan pengembangan karir, pengisian jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, pengisian PNS dalam jabatan melalui mutasi dan promosi, hak dan kesempatan pegawai ASN untuk mengembangkan kompetensi, mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional, pengembangan kompetensi sebagai dasar pengembangan karir dan terdapat materi muatan dengan pembatasan yaitu tentang perpindahan antar jabatan. Hasil analisis implementasi kebijakan menunjukkan kurangnya perhatian untuk pengembangan karir dalam jabatan fungsional dari segi pembinaan, peningkatan kompetensi, perencanaan anggaran dan lainnya, belum optimalnya pemetaan dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kurangnya sosialisasi regulasi dan pemberlakuan sanksi, kurangnya penataan dan penempatan PNS di jabatan yang sesuai, alur pengembangan karir berupa pedoman pelaksanaan dalam proses pengembangan karir belum jelas.

**Kesimpulan:** Rekomendasi utama adalah menyempurnakan materi muatan peraturan perundang-undangan didalam kebijakan daerah dan mengatasi permasalahan yang ada dalam implementasi kebijakan.

**Kata kunci :** Pengembangan karir, analisis kebijakan, ROCCIPI